



# PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali

## KATA PENGANTAR

Puja pengastuti dan Angayubagia kami haturkan kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024 telah selesai disusun.

Rancangan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Periode 2024 – 2026 dan selanjutnya dipakai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA SKPD Perubahan Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja ini diharapkan segala potensi yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat diarahkan dan dioptimalkan secara bertahap dalam rangka Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik Yang Efektif dan Efisien.

Demikian agar Rancangan Rencana Kerja ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2024.

Denpasar, 2 September 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Provinsi Bali,



**Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680531 199703 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Bali Tahun Lalu .....	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Diskominfo .....	 7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah .....	 32
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD .....	33
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	 43
 BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah .....	 47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi .....	 47
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	47
3.3 Program Dan Kegiatan .....	49
 BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	 53
BAB V Penutup .....	62

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pada Lampiran V disebutkan bahwa tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi tersebut, diperlukan sebuah rencana kerja konkret yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang mana Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional, serta menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Penyusunan



Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan Tingkat Pusat dan dokumen perencanaan Tingkat Provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Provinsi Bali Tahun 2024.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- m. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- n. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- t. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
  - u. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
  - v. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
  - w. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21);

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam rangka mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah sebagai standar acuan kinerja aparat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya selama 1 Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024) sebagaimana telah tertuang dalam RPD Pemerintah Provinsi Bali



dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali 2024-2026

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan: Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;
- BAB II Hasil Evaluasi Renja Diskominfo Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II: Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2022 dan Capaian Renstra Diskominfo, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah: Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan;
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan;
- BAB V Penutup

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**DAN STATISTIK PROVINSI BALI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN**  
**TRIWULAN II**

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOS TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOS

Sesuai Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ditetapkan perencanaan kinerja untuk tahun 2024 sebanyak 5 program, 11 kegiatan dan 41 Sub kegiatan.

Dalam tabel 2.1 berikut disajikan program, kegiatan dan indikator kinerja dalam target dan realisasi kinerja sbb :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		
				Target Renja Diskominfos Th 2024	Realisasi Renja Diskominfos Th 2024	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)
<b>2.16.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
<b>2.16.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>	<b>82.75 Nilai</b>	<b>82.75 Nilai</b>	<b>**)</b>	<b>Hasil penilaian belum ada **)</b>
<b>2.16.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia</b>	<b>16 Dokumen</b>	<b>16 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	44%
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%
2.16.01.1.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia</b>	75 Dokumen	75 Dokumen	25 Dokumen	33%
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	78 Orang/ Bulan	78 Orang/ Bulan	100%

	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		
				Target Renja Diskominfos Th 2024	Realisasi Renja Diskominfos Th 2024	Tingkat Realisasi (%)
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.16.01.1.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia</b>	12 Bulan	12 Bulan	5 Bulan	42%
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	5 Paket	63%
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	24 Paket	53%
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13505 Dokumen	13505 Dokumen	4026 Dokumen	30%
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	0	0%
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	15 Laporan	30%

	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		
				Target Renja Diskominfos Th 2024	Realisasi Renja Diskominfos Th 2024	Tingkat Realisasi (%)
2.16.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan</b>	3 Paket	3 Paket	Paket	0%
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0	0%
2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0	0%
2.16.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan</b>	12 Bulan	12 Bulan	5 Bulan	42%
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	33%
2.16.01.1.09.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai</b>	674 Unit	674 Unit	40 Unit	6%

	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		
				Target Renja Diskominfos Th 2024	Realisasi Renja Diskominfos Th 2024	Tingkat Realisasi (%)
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit	14 Unit	50%
2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	489 Unit	489 Unit	7 Unit	1%
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 bulan	60 bulan	1 bulan	2%
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	2 Unit	29%
2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	51 Unit	16 Unit	31%
2.16.02.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase informasi yang disebarluaskan</b>	93.40 persen	93.40 persen		
2.16.02.1.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	82.00 Indeks	82.00 Indeks	0	0%
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	120 Dokumen	120 Dokumen	63 Dokumen	53%



	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		
				Target Renja Diskominfos Th 2024	Realisasi Renja Diskominfos Th 2024	Tingkat Realisasi (%)
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	30000 Dokumen	30000 Dokumen	1215 Dokumen	4%
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	96 Dokumen	96 Dokumen	45 Dokumen	47%
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	200 Orang	0 Orang	0%
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20000 Dokumen	20000 Dokumen	11440 Dokumen	57%
<b>2.16.03.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan Teknologi Informatika</b>	<b>91,00 Persen</b>	<b>91,00 Persen</b>		
<b>2.16.03.1.02.</b>	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>28.57 Persen</b>	<b>2857%</b>
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		2 Dokumen	0 Dokumen	<b>0%</b>
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskominfos) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		
				Target Renja Diskominfos Th 2024	Realisasi Renja Diskominfos Th 2024	Tingkat Realisasi (%)
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
<b>2.20.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>4.00 nilai</b>	<b>4.00 nilai</b>		
<b>2.20.02.1.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi</b>	<b>11 Sektor</b>	<b>11 Sektor</b>		0%
2.20.02.1.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.20.02.1.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.20.02.1.01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
<b>2.21.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					
<b>2.21.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Indeks Evalaksan</b>	<b>75.00 nilai</b>	<b>75.00 nilai</b>		
<b>2.21.02.1.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan</b>	<b>29 OPD</b>	<b>29 OPD</b>	<b>29 OPD</b>	100%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskominfos) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		
				Target Renja Diskominfos Th 2024	Realisasi Renja Diskominfos Th 2024	Tingkat Realisasi (%)
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	100%
<b>2.21.02.1.02.</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun</b>	<b>29 OPD</b>	<b>29 OPD</b>	<b>29 OPD</b>	100%
2.21.02.1.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi</b>	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	100%
	<b>UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital</b>					
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
<b>2.16.03.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan Teknologi Informatika</b>	<b>91,00 Persen</b>	<b>91,00 Persen</b>		<b>0%</b>

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskominfos) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		
				Target Renja Diskominfos Th 2024	Realisasi Renja Diskominfos Th 2024	Tingkat Realisasi (%)
<b>2.16.03.1.02.</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>28.57 Persen</b>	<b>28.57%</b>
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		28 unit	14 unit	50.00 %
	<b>UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali</b>					
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
<b>2.16.03.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan Teknologi Informatika</b>	<b>91,00 Persen</b>	<b>91,00 Persen</b>		<b>0%</b>
<b>2.16.03.1.02.</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>28.57 Persen</b>	<b>28.57%</b>
2.16.03.1.02.01	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		2 Dokumen	0 Dokumen	0

Mengacu pada anggaran induk tahun 2024 sesuai DPA tertanggal 28 Desember 2023 nomor DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2024 maka jumlah keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp. 168.993.725.334 (Seratus Enam Puluh Milliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat).

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Semester II sebagaimana target pencapaian renstra 2024-2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan telah mencapai nilai rata-rata capaian kinerja output sebesar 39.50%.

Realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 83,684,382,279 atau sebesar 49,52%. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2024 Triwulan II, maka uraian program berdasarkan target dan realisasi sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 17,520,257,300.00 terealisasi sebesar Rp. 9,132,947,294.00 (52,13%).
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 12,481,421,260.00 terealisasi Rp. 4,359,063,895.00 (34.92%).
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan anggaran Rp. 138,036,692,194.00 dapat terealisasi Rp. 69,775,211,156.00 (50.55%).
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan anggaran Rp. 441,297,200.00 dapat terealisasi Rp. 206,317,094.00 (46.75%).

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran Rp. 514,057,380.00 terealisasi Rp. 210,842,840.00 (41.02%).

## 2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan perangkat daerah dalam tahun 2023 berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal/waktu pelaksanaan dan dukungan anggaran, sehingga target fisik dan keuangan dapat terealisasi dengan maksimal. Tujuan Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik yang Efektif dan Efisien dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menargetkan indeks sebesar 3,00 dan terealisasi sebesar 4,07 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya target indeks SPBE 2,52 dan terealisasi 3,68 dan merupakan capaian tertinggi untuk tingkat provinsi. Pada pemeringkatan nilai, indeks 4,07 merupakan peringkat dengan kategori sangat baik karena berada di level 3,5 – 4,2. Pelayanan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian melalui program-program prioritas secara garis besar dapat diuraikan sbb:

### 1. Program pengelolaan aplikasi informatika

Diwujudkan dengan kegiatan:

#### a) Layanan Free Wifi

Pada tahun 2023 layanan BKK Free Wifi bagi Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas pada 2.150 titik layanan wifi untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur terintegrasi serta konektivitas antar-wilayah. Layanan Free Wifi



tersebut dikecualikan untuk Kabupaten Badung, karena dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung. Data layanan BKK Free Wifi terinci sesuai tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Data Layanan BKK Free Wifi

NO	KAB./KOTA	Lokasi Pemasangan				Jumlah Titik Wifi
		Puskesmas	Obyek Wisata	Desa Adat	Fasilitas Umum	
		2023	2023	2023	2023	2023
1	DENPASAR	11	8	35	21	75
2	GIANJAR	13	61	273	32	379
3	BANGLI	12	38	168	43	261
4	KLUNGKUNG	9	17	122	28	176
5	KARANGASEM	12	15	190	73	290
6	BULELENG	20	25	170	111	326
7	JEMBRANA	10	15	64	73	162
8	TABANAN	20	24	349	88	481
9	BADUNG	Dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung				
JUMLAH		107	203	1,371	469	2,150

Selain layanan wifi gratis melalui BKK juga dilaksanakan layanan Wifi Gratis untuk SMAN/SMKN/SLBN se- Bali sebanyak 157 titik melalui APBD Provinsi Bali.

Tabel 2.3 Data Layanan Free Wifi di SMAN/SMKN/SLBN

NO	KAB./KOTA	JUMLAH			
		SMA	SMK	SLB	TOTAL
1	DENPASAR	11	6	3	20
2	BADUNG	13	4	1	18
3	GIANJAR	8	8	1	17
4	TABANAN	9	3	1	13
5	BANGLI	5	9	1	15
6	KLUNGKUNG	8	2	1	11
7	KARANGASEM	10	7	1	18

8	<b>JEMBRANA</b>	7	5	1	<b>13</b>
9	<b>BULELENG</b>	17	13	2	<b>32</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>88</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>157</b>

b) Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi

Pengelolaan/pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023 terpusat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sejak ditetapkannya SPBE Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Roadmap SPBE Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020. Aplikasi yang dibangun/dikembangkan pada tahun 2023 sebanyak 38 aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat dan pegawai pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berbagai sistem aplikasi yang dikembangkan antara lain:

- Pengembangan Single Sign On Pemprov Bali (<https://sso.baliprov.go.id/>)
- Kantor Virtual (<https://kanal.baliprov.go.id/>)
- Kantor Virtual (App Android dan IOS)
- Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (<https://simpeg.baliprov.go.id/>)
- Pengembangan Sistem Absensi (<https://hadir.baliprov.go.id/>)
- Pengembangan Aplikasi Absensi Pegawai (App Andorid dan IOS)
- Data Sektoral Provinsi Bali (<http://datasektoral.baliprov.go.id/>)
- Seleksi Tim SPBE Pemerintah Provinsi Bali (<https://seleksitimspbe.baliprov.go.id/>)

- Sistem Antrean Riwayat Kesehatan Administrator (<https://antrean.baliprov.go.id/>)
- Pengembangan Website Portal Provinsi Bali (<https://baliprov.go.id/>)
- Kantor Virtual Publik (<https://kanal.baliprov.go.id/publik/login>)
- Satu Data Provinsi Bali (<https://balisatudata.baliprov.go.id/>)
- Sistem Informasi Pelayanan Perikanan (SIMPELkan) (<https://simplkan.baliprov.go.id/>)
- Website Sigapura dan Neraca Pangan (<https://sigapura.baliprov.go.id/>)
- Pengembangan E-Perijinan (<https://eperizinan.baliprov.go.id/>)
- Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) (<https://sisnaker.baliprov.go.id/>)
- Aplikasi EventID (<https://event.baliprov.go.id/>)
- Antrean dan Riwayat Kesehatan (APP Android dan IOS)
- Sistem Keuangan Desa Adat (Sikuat) (<https://sikuat.baliprov.go.id>)
- Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (Jidhat) (<https://jidhat.baliprov.go.id/>)
- Sensus Desa Adat (<https://sensusadat.baliprov.go.id/>)
- Ceraken Kebudayaan Bali (<https://ceraken.baliprov.go.id>)
- Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan (SISLAB) (<https://labkes.baliprov.dev>)
- SILEBAH (Sistem Informasi dan Pelayanan Online Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan) (<https://silebah.baliprov.go.id/>)
- Bulan Bung Karno (<https://bulanbungkarno.baliprov.go.id/>)
- Pameran Virtual (<https://pameran.baliprov.go.id/>)
- Virtual Pulaki (APP On Oculus Store)
- VR Rindik (APP On Oculus Store)
- Pengembangan mobile SIK-KBS

- Pengembangan Aplikasi Si Pay  
(<https://sipay.baliprov.go.id/> )
- Pengembangan Aplikasi ESAKIP  
(<https://esakip.baliprov.go.id/> )
- Knowledge Based Insight  
(<https://insight.baliprov.go.id/> )
- Strategi Penguatan Penerapan Manajemen Risiko Berkualitas Melalui Aplikasi Terintegrasi (SUPERMAN KUAT)  
(<https://supermankuat.baliprov.go.id/> )
- Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (PETI EMAS) (<https://petiemas.baliprov.go.id/> )
- Bug Bounty (<https://bugbounty.baliprov.go.id/> )
- Sistem Aset dan Padruwen  
(<https://aset.baliprov.go.id/> )
- Sistem Inventory (SIRI) (<https://siri.baliprov.go.id/> )
- Game Nyomia Bhutakala (<https://api-nyomia.baliprov.dev/> )

c) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali

Pusat data Pemerintah Provinsi Bali berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi (*private cloud*) serta pusat penyaluran akses internet keseluruhan perangkat daerah Provinsi Bali. Layanan *private cloud* berupa layanan virtual machine yang digunakan untuk menempatkan aplikasi, website dan data penyimpanan pada *private cloud* tersebut.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik saat ini mengelola Pusat Data yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi serta pusat penyaluran akses internet keseluruhan Perangkat Daerah Provinsi Bali. Pusat Data

juga memberikan layanan komputasi *private cloud* bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Layanan komputasi yang saat ini digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) tersebut berupa layanan *virtual machine* yang digunakan untuk menempatkan data, aplikasi dan website. *Private cloud* ini dibangun diatas perangkat keras HP Blade Server C7000 dengan jumlah server fisik sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total kapasitas terpasang :

vCPU : 128 core

(alokasi minus, tapi tidak digunakan secara penuh)

Memori : 768 GB (tersisa 300 GB)

Storage : 26 TB (tersisa 4TB)

Bandwidth : 1.5 Gbps

Kondisi interkoneksi private network dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali saa ini:

1. Terintegrasi dengan Pusat Data

- Jalur FO Langsung: 32 PD, 28 UPTD
- Jalur Metrolink : 6 PD, 29 UPTD, 8 SMA/SMK

2. Jaringan Belum Terintegrasi: 149 SMAN/SMK/SLBN

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi terpadu dan multi fungsi untuk mengintegrasikan layanan-layanan siaran TV digital terrestrial, telekomunikasi seluler, internet dan komunikasi radio komunitas, dalam wujud sebuah menara komunikasi bersama sekaligus sebagai destinasi pariwisata teknologi terpadu berbasis kearifan lokal Bali berupa Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali” diharapkan akan menjadi pengungkit perekonomian Bali, dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru.

Dalam rangka pembangunan Taman Teknologi tersebut, telah dilakukan perencanaan dan pelaksanaan struktur menara dan bangunan pelengkap, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan arsitektur menara dan bangunan pelengkap, dan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP). Program tersebut merupakan program multi years.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui:

a. Penyebarluasan Program Pemprov Bali Melalui Media Cetak, Media Elektronik, serta Media Online.

b. Pelayanan Informasi Publik

Layanan informasi dilaksanakan dalam rangka penyampaian program-program pembangunan kepada masyarakat agar masyarakat tahu kegiatan yang dilakukan pemerintah sekaligus masyarakat dapat memantau, mengawasi program-program tersebut. Pelayanan informasi melalui Bimbingan Teknis PPID telah dilaksanakan sebanyak 1 kali.

c. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, melalui: Literasi Informasi dan media sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu melaksanakan kegiatan literasi digital di 3 kabupaten yakni Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Jembrana dengan peserta dari pegawai ASN dan melaksanakan sidang sengketa informasi publik sebanyak 2 kali oleh Komisi Informasi Provinsi Bali.



- d. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  
Pelayanan sound system melalui satu unit mobil, lengkap dengan perangkat sound beserta tenaga operatornya, dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan pimpinan dan kegiatan perangkat daerah lainnya.
3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
    - a. Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)  
Menyelenggarakan Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mendeteksi, menanggulangi dan memulihkan segala bentuk ancaman serangan cyber yang bertujuan mengamankan informasi elektronik.
    - b. Kontra Penginderaan  
Melaksanakan kegiatan Kontra Penginderaan (KP), layanan Jammer yang bertujuan pengamanan informasi non elektronik Kontra Penginderaan adalah analisa pemindaian frekuensi dan pemeriksaan barang elektronik untuk menghindari terjadinya penyadapan yang dapat berpotensi menjadi sumber kebocoran informasi.
    - c. Tanda Tangan Elektronik (TTE)  
Implementasi Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada seluruh pejabat ess I dan II di lingkup Pemerintah Provinsi Bali, Sebagai salah satu upaya pengamanan informasi elektronik
    - d. IT Security Assesment (ITSA)  
ITSA adalah pengujian yang dilakukan pada sebuah aplikasi elektronik (software) dalam tahapan testing (**sebelum aplikasi diluncurkan**) dengan tujuan untuk

menemukan celah kerentanan keamanan sehingga tidak menjadi sumber permasalahan dikemudian hari.

#### 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Bali Satu Data merupakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang dirancang sebagai inovasi berkelanjutan dari perbaikan tata Kelola Data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Amanat dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas sebagai walidata untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data statistik sektoral melalui Portal Satu Data, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Diskominfo Provinsi Bali dalam Tahun 2023 telah menyusun Buku Metadata Statistik Sektoral.

Sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, maka telah disusun Buku Bali Membangun Tahun 2023 yang menyajikan data – data statistik sektoral.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Bali s/d Triwulan II Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Kode	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Prsentase				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4-5)
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,018,000		80.15	80.17	80.15	0.00	18,018,000
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,139,800		100.00	100.00	100.00	0.00	5,139,800
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,518,500		65.48	48.00	65.48	0.00	6,518,500
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12,985,533,000	7,558,951,159	74.79	74.79	74.79	58.21	5,426,581,841
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	702,713,000	15,290,000	59.53	22.21	59.53	2.18	687,423,000
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,488,840	3,932,000	100.00	100.00	100.00	87.60	556,840
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40,007,200	29,376,000	100.00	93.81	100.00	73.43	10,631,200

Kode	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Prsentase				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	87,500,000	18,300,000	25.71	39.00	25.71	20.91	69,200,000
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13,660,900	3,485,000	100.00	80.74	100.00	25.51	10,175,900
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	31,522,200	3,610,200	75.13	75.13	75.13	11.45	27,912,000
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-						-
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121,329,000	24,399,422	65.75	42.84	65.75	20.11	96,929,578
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-						-
2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-						-
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	2,500,000	100.00	100.00	100.00	83.33	500,000
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	350,000,000	158,235,491	65.27	50.00	65.27	45.21	191,764,509

Kode	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Prsentase				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	180,000,000	44,915,580	50.00	50.00	50.00	24.95	135,084,420
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1,386,501,960	733,024,300	73.94	70.52	73.94	52.87	653,477,660
2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6,400,000	-	89.06	50.00	89.06	0.00	6,400,000
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99,570,000	11,785,000	69.65	53.61	69.65	11.84	87,785,000
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,393,874,900	499,081,750	44.56	37.43	44.56	35.81	894,793,150
2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	84,480,000	26,061,392	57.51	51.64	57.51	30.85	58,418,608
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1,026,857,440	478,033,748	67.91	64.34	67.91	46.55	548,823,692
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5,359,038,200	732,685,125	51.45	43.38	51.45	13.67	4,626,353,075

Kode	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Prsentase				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1,385,259,640	159,456,129	21.96	13.29	21.96	11.51	1,225,803,511
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	2,537,087,840	2,218,652,975	90.19	87.52	90.19	87.45	318,434,865
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1,837,802,840	613,669,098	50.09	39.81	50.09	33.39	1,224,133,742
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	335,375,300	156,566,820	50.65	81.06	50.65	46.68	178,808,480
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,306,175,700	3,465,400	99.91	38.74	99.91	0.27	1,302,710,300
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	114,906,547,890	64,156,167,046	98.72	69.70	98.72	55.83	50,750,380,844
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12,337,356,240	3,262,289,619	52.96	25.83	52.96	26.44	9,075,066,621
2.20.02.1.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	150,743,840	59,990,558	71.75	50.35	71.75	39.80	90,753,282



Kode	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Prsentase				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
	Sektoral	dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							
2.20.02.1.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	164,656,480	88,612,838	69.48	68.41	69.48	53.82	76,043,642
2.20.02.1.01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	125,896,880	57,713,698	59.37	68.30	59.37	45.84	68,183,182
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	36,899,300	4,153,422	100.00	63.72	100.00	11.26	32,745,878
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	168,137,340	90,604,789	70.16	62.23	70.16	53.89	77,532,551
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	81,166,900	20,949,600	44.50	46.72	44.50	25.81	60,217,300

Kode	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Prsentase				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	98,758,000	35,047,920	93.17	82.78	93.17	35.49	63,710,080
2.21.02.1.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	129,095,840	60,087,109	56.74	58.89	56.74	46.54	69,008,731
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6,668,918,940	2,287,314,591	52.16	60.84	52.16	34.30	4,381,604,349
2.16.03.1.02.01	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2,817,693,424	65,974,500	47.83	2.40	47.83	2.34	2,751,718,924
TOTAL			168,993,725,334	83,684,382,279	86.58	63.21	86.58	49.52	85,309,343,055

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika dan statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali berperan dalam mendukung tujuan 5 yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi yang diwujudkan dengan komunikasi dan informasi publik yang

efektif dan efisien dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Program Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Sedangkan untuk dapat mendukung tujuan 6 RPD Provinsi Bali yaitu Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan diwujudkan dengan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi melalui Program Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.

Dalam rangka mewujudkan komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien berbasis Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi juga melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Tugas pokok dan fungsi diwujudkan dalam bentuk program dan direalisasi melalui kegiatan dengan sub-sub kegiatannya.

#### 2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

Pada RKPD tahun 2024 telah direncanakan target pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 168,993,725,334.00 (Seratus enam puluh delapan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Pada urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, terdapat program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase Informasi Yang Disebarluaskan dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator Persentase Layanan Teknologi Informatika.

Pada urusan pemerintahan bidang Statistik terdapat Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik.

Pada urusan pemerintahan bidang Persandian terdapat program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Indeks Evalaksan.

Rekapitulasi daftar perubahan anggaran program dan kegiatan pada rancangan akhir perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel RKPD Perubahan

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				159,507,112,970	160,414,677,764	907,564,794	
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				158,551,758,390	159,531,404,144	979,645,754	
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.75 Nilai	82.75 Nilai	17,520,257,300	18,826,330,614	1,306,073,314	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen	16 Dokumen	29,676,300	29,676,300	-	
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	18,018,000	18,018,000	-	
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,139,800	5,139,800	-	

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	6,518,500	6,518,500	-	
<b>2.16.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia</b>	<b>75 Dokumen</b>	<b>75 Dokumen</b>	<b>13,688,246,000</b>	<b>15,116,593,114</b>	<b>1,428,347,114</b>	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	125 Orang/ Bulan	12,985,533,000	14,413,880,114	<b>1,428,347,114</b>	penambahan gaji PPPK dan Penambahan TPP PNS
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	702,713,000	702,713,000	-	
<b>2.16.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>298,508,140</b>	<b>298,508,140</b>	-	
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4,488,840	4,488,840	-	
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	40,007,200	40,007,200	-	
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	87,500,000	87,500,000	-	

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13,660,900	13,660,900	-	
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13505 Dokumen	13505 Dokumen	31,522,200	31,522,200	-	
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	121,329,000	121,329,000	-	
<b>2.16.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>3 Paket</b>		-	-	-	
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		-	-	-	
2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		-	-	-	
<b>2.16.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>533,000,000</b>	<b>533,000,000</b>	-	



KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	-	
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	350,000,000	350,000,000	-	
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	4 Laporan	180,000,000	180,000,000	-	
<b>2.16.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai</b>	<b>674 Unit</b>	<b>674 Unit</b>	<b>2,970,826,860</b>	<b>2,848,553,060</b>	<b>(122,273,800)</b>	
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit	1,386,501,960	1,386,501,960	-	
2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	489 Unit	489 Unit	6,400,000	6,400,000	-	
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 bulan	60 bulan	99,570,000	99,570,000	-	

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	1,393,874,900	1,271,601,100	(122,273,800)	Pengurangan Gaji Non ASN Lolos PPPK
2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	51 Unit	84,480,000	84,480,000	-	
2.16.02.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase informasi yang disebarluaskan</b>	<b>93.40 persen</b>	<b>93.40 persen</b>	<b>12,481,421,260</b>	<b>12,359,127,160</b>	<b>(122,294,100)</b>	
2.16.02.1.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi</b>	<b>82.00 Indeks</b>	<b>82.00 Indeks</b>	<b>12,481,421,260</b>	<b>12,359,127,160</b>	<b>(122,294,100)</b>	
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	120 Dokumen	120 Dokumen	1,026,857,440	953,492,960	(73,364,480)	Pengurangan Gaji Non ASN Lolos PPPK
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	30000 Dokumen	30000 Dokumen	5,359,038,200	5,334,563,440	(24,474,760)	Pengurangan Gaji Non ASN Lolos PPPK
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	96 Dokumen	96 Dokumen	1,385,259,640	1,385,259,640	-	

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	25 Orang	2,537,087,840	2,537,087,840	-	
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1,837,802,840	1,813,347,980	(24,454,860)	Pengurangan Gaji Non ASN Lolos PPPK
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20000 Dokumen	20000 Dokumen	335,375,300	335,375,300	-	
2.16.03.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan Teknologi Informatika</b>	<b>91,00 Persen</b>	<b>91,00 Persen</b>	<b>128,550,079,830</b>	<b>128,345,946,370</b>	<b>(204,133,460)</b>	
2.16.03.1.02	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>128,550,079,830</b>	<b>128,345,946,370</b>	<b>(204,133,460)</b>	
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	1,306,175,700	1,306,175,700		

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	114,906,547,890	114,786,841,630	(119,706,260)	Pengurangan Gaji Non ASN Lolos PPPK
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	12,337,356,240	12,252,929,040	(84,427,200)	Pengurangan Gaji Non ASN Lolos PPPK
<b>2.20.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>441,297,200</b>	<b>416,841,840</b>	<b>(24,455,360)</b>	
<b>2.20.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>4.00 nilai</b>	<b>4.00 nilai</b>	<b>441,297,200</b>	<b>416,841,840</b>	<b>(24,455,360)</b>	
<b>2.20.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi</b>	<b>11 Sektoral</b>	<b>11 Sektoral</b>	<b>441,297,200</b>	<b>416,841,840</b>	<b>(24,455,360)</b>	
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	150,743,840	150,743,840	-	
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	164,656,480	164,656,480	-	

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	
2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	125,896,880	101,441,520	(24,455,360)	Pengurangan Gaji Non ASN Lolos PPPK
<b>2.21.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>514,057,380</b>	<b>466,431,780</b>	<b>(47,625,600)</b>	
<b>2.21.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Indeks Evalaksan</b>	<b>75.00 nilai</b>	<b>75.00 nilai</b>	<b>514,057,380</b>	<b>466,431,780</b>	<b>(47,625,600)</b>	
<b>2.21.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan</b>	<b>29 OPD</b>	<b>29 OPD</b>	<b>384,961,540</b>	<b>337,335,940</b>	<b>(47,625,600)</b>	
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	36,899,300	36,899,300	-	
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	168,137,340	163,637,340		
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	81,166,900	33,541,300	(47,625,600)	Pengurangan Gaji Non ASN Lolos PPPK

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	98,758,000	103,258,000		
<b>2.21.02.1.02</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun</b>	<b>29 OPD</b>	<b>29 OPD</b>	<b>129,095,840</b>	<b>129,095,840</b>	<b>-</b>	
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	129,095,840	129,095,840	-	
	<b>UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital</b>				<b>6,668,918,940</b>	<b>6,136,378,140</b>	<b>(532,540,800)</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>6,668,918,940</b>	<b>6,136,378,140</b>	<b>(532,540,800)</b>	
<b>2.16.03.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan Teknologi Informatika</b>	<b>91,00 Persen</b>	<b>91,00 Persen</b>	<b>6,668,918,940</b>	<b>6,136,378,140</b>	<b>(532,540,800)</b>	
<b>2.16.03.1.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>6,668,918,940</b>	<b>6,136,378,140</b>	<b>(532,540,800)</b>	
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	28 unit	28 unit	6,668,918,940	6,136,378,140	(532,540,800)	Pengurangan Gaji Non ASN Lolos PPPK
	<b>UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali</b>				<b>2,817,693,424</b>	<b>2,817,674,924</b>	<b>(18,500)</b>	

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>2,817,693,424</b>	<b>2,817,674,924</b>	<b>(18,500)</b>	
<b>2.16.03.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan Teknologi Informatika</b>	<b>91,00 Persen</b>	<b>91,00 Persen</b>	<b>2,817,693,424</b>	<b>2,817,674,924</b>	<b>(18,500)</b>	
<b>2.16.03.1.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2,817,693,424</b>	<b>2,817,674,924</b>	<b>(18,500)</b>	
2.16.03.1.02.01	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2,817,693,424	2,817,674,924	(18,500)	
<b>TOTAL</b>					<b>168,993,725,334</b>	<b>169,368,730,828</b>	<b>375,005,494</b>	

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Beberapa usulan/masukan yang disampaikan peserta Forum Perangkat Daerah terhadap Rancangan Renja Diskominfo Tahun 2024 pada prinsipnya tidak menambah program/kegiatan baru namun merupakan dukungan dan menyempurnakan rancangan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Usulan tersebut sebagai berikut:

NO	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
1	Diharapkan kedepannya semua masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses segala kebutuhan seperti informasi harga pangan dan ketersediaan kamar rumah sakit melalui sebuah aplikasi. Hal ini juga harus diiringi dengan pemeliharaan jaringan dan penyebaran wifi gratis yang lebih merata.	Kelompok Ahli Praktisi Media
2	Penyebaran informasi program kerja Gubernur telah dilaksanakan di berbagai media seperti surat kabar dan TV Nasional. Namun yang perlu diperhatikan adalah media yang lebih banyak diakses oleh masyarakat pada masa sekarang adalah media sosial, sehingga dapat menjadi fokus dalam penyebaran informasi kedepannya.	Kelompok Ahli Praktisi Media
3	Literasi yang dilaksanakan masih bersifat satu sisi karena belum adanya timbal balik secara konkret terhadap informasi yang disampaikan. Perlu adanya minimal 2 yowana yang dikelola dari masing-masing desa adat sebagai jurnalis desa sehingga Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan berita, sekaligus sebagai perpenjangan tangan dalam penyebaran informasi dari Pemerintah Provinsi Bali ke desa adat	Kelompok Ahli Praktisi Media
4	<i>Press release</i> yang dibuat oleh tim Humas masih banyak yang menggunakan kalimat yang tidak efektif. Masih perlu dilaksanakan audit agar <i>press release</i> yang dikeluarkan bersifat singkat, padat namun	Kelompok Ahli Praktisi Media



NO	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	tetap jelas dan informatif.	
5	Terkait Target Kinerja, Sasaran, Program, Kegiatan, Lokasi dan kelompok Sasaran yang telah disusun agar diselaraskan pada Renstra Perangkat Daerah.	BAPPEDA
6	Terkait Isu-isu strategis sudah termasuk isu teraktual di tahun 2024 sehingga dapat dikoordinasikan dengan bagian Perencanaan di Bappeda untuk melakukan perubahan pada RPD dan RKPD	BAPPEDA
7	Setelah melakukan peliputan diharapkan berita/informasi tersebut agar segera dipublikasikan (unggah) agar berita lebih bersifat aktual. Jangan sampai terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi.	PRSSNI Bali
8	Diharapkan kedepannya Diskominfo Provinsi Bali dapat bekerjasama dengan radio di Bali lainnya yang belum mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama untuk menyebarkan informasi Pemerintah Provinsi Bali. Jika terdapat kendala dalam hal anggaran dapat berkoordinasi dengan Diskominfo Kabupaten/Kota untuk dapat membantu mengelola stasiun radio di daerahnya.	PRSSNI Bali
9	Konten Muatan Lokal diharapkan dapat tayang saat <i>prime time</i> . Konten muatan local tersebut tidak harus menggunakan Bahasa local/daerah, namun dapat menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing radio selama mengikuti P3SPS.	PRSSNI Bali
10	Mohon diperhatikan apakah dengan banyaknya informasi yang disampaikan melalui media mainstream berdampak pada efektifitas informasi yang disampaikan, melihat bahwa banyak juga informasi yang tersebar di media sosial (digital) yang kontra produktif dengan informasi dari Pemerintah Provinsi Bali.	KPID Bali

NO	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
11	Perlu memperbaiki manajemen komunikasi dalam pengelolaan informasi. Hal ini dapat dilaksanakan dengan SDM yang mengerti media, yang mampu melakukan analisa, dan yang bisa memberikan alternatif solusi dalam hal komunikasi.	KPID Bali
12	Dalam rangka pelaksanaan Forum Reformasi Birokrasi, TVRI melaksanakan kegiatan Forum dalam rangka pengentasan kemiskinan, diharapkan Diskominfo dapat mengkoordinasikan dengan OPD lain apabila akan bekerjasama dengan TVRI	TVRI
13	Dalam rangka pelaksanaan tugas RRI telah mengikuti perkembangan teknologi dengan peluncuran aplikasi Play Go. Terkait kecepatan informasi sudah diakomodir dengan menyampaikan link berita secara langsung.	RRI
14	Konvergensi media telah berkembang dan media sosial memiliki potensi yang besar dalam penyebaran informasi. Hal ini juga harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk menangkal Hoax yang beredar. Namun perlu juga dilakukan analisis media agar konten yang dihasilkan dapat memberikan dampak sesuai dengan yang diharapkan	PWI
15	Kedepannya diharapkan adanya kerjasama antara PWI dan Diskominfo Provinsi Bali untuk melakukan Uji Kompetensi yang bertujuan untuk memfiltrasi Wartawan/SDM	PWI
16	Semua Isu Strategis kedepannya harus didukung oleh data valid dalam bentuk persentase sehingga dapat diukur dan diketahui kendalanya.	Kelompok Ahli Pembangunan
17	Gen Z atau anak yang lahir dari tahun 1997 ke atas memiliki persentase mengonsumsi media sosial tertinggi diantara generasi lainnya. Diharapkan untuk konten informasi di media sosial dibuat agar dapat menjangkau Gen Z	Kelompok Ahli Pembangunan

NO	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	tersebut.	
18	Dalam penyebaran informasi diharapkan tidak terjadi gap antara daerah perkotaan dan pedesaan, terutama daerah <i>blank spot</i> . Sasaran wifi gratis diharapkan dapat lebih menyebar dan merata.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 terdapat 2 arah kebijakan prioritas nasional yang didukung oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, yakni Kebijakan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Kebijakan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas telekomunikasi dan informatika dilakukan dalam rangka pemerataan akses informasi dan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya menjamin akses informasi bagi masyarakat namun juga mendorong terjadinya transformasi digital pada beberapa sektor prioritas. Sektor telekomunikasi dan informatika harus dapat mendorong sektor lain dalam meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan layanan, maupun menyediakan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

Akses informasi yang semakin luas dan mudah juga berimbas terhadap perubahan pola hubungan pemerintah dengan masyarakat. Pola hubungan secara interaktif dua arah menjadi hal yang lebih relevan untuk diterapkan. Diperlukan berbagai inovasi dalam penyampaian kebijakan pemerintah agar dapat secara cepat dan tepat tersampaikan kemasyarakat. Hal tersebut dilakukan guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

##### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam mewujudkan tujuan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Bali 2024-2026 yang menetapkan dua tujuan yaitu:

Tujuan 5 RPD : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.

- Indikator tujuan : Indeks Infrastruktur.
- Sasaran Pemerintah Daerah : Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Indikator Sasaran : Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Sasaran Perangkat Daerah : Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien
- Indikator Sasaran : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada tujuan 5 RPD tersebut Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Provinsi Bali mewujudkannya melalui Program pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator Persentase Pelayanan Teknologi Informatika

Tujuan 6 RPD : Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan.

- Indikator tujuan : Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Sasaran Pemerintah Daerah : Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat.
- Indikator Sasaran : Indeks demokrasi
- Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi
- Indikator Sasaran : Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Pada tujuan 6 RPD tersebut Dinas Komunikasi informatika dan Statistik provinsi Bali mewujudkannya melalui Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan indikator: Persentase Informasi yang Disebarluaskan.

Terhadap tujuan 5 RPD dan tujuan 6 RPD tersebut didukung oleh tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik Yang Efektif dan Efisien.

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 merencanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

#### I. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

##### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - f) Fasilitasi kunjungan tamu.
  - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - a) Pengadaan Mebel.

- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - b) Pemeliharaan Mebel.
  - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

#### B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.

- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.
  - a) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.
  - b) Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
  - c) Pelayanan Informasi Publik.
  - d) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
  - e) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah.
  - f) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

#### C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA.

- 1) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

- a) Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.
- c) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.

#### D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

- 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Provinsi.
  - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
  - b) Membangun Metadata Statistik Sektoral.
  - c) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

#### E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI.

- 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
  - a) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
  - b) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
  - c) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  - d) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi.
  - a) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

### II. UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital

#### A. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA.

- 1) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.



- a) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

### III. UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital

#### A. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA.

- 1) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.
- b) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024 meliputi:

Dibidang urusan komunikasi dan informatika direncanakan; Menyelenggarakan keterbukaan informasi publik dan literasi media, Meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan kapasitas kehumasan, Mengelola perangkat dan jaringan system informasi, pembangunan taman teknologi, menyediakan akses internet kepada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, SMA/SMK, dan UPT, Menyebarkan, mengelola informasi publik. Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Dibidang urusan statistik direncanakan; melaksanakan pengumpulan dan menganalisis data statistik sektoral.

Dibidang persandian direncanakan meningkatkan kapasitas aparatur persandian, hubungan jaringan persandian pusat, provinsi dan kab/kota se Bali dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Seluruh rencana kerja tersebut dirangkum dalam 5 Program, 11 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

Anggaran tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 169.368.730.828,00 terinci sbb:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp 17.520.257.300,00.
- B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp 12.481.421.260,00.
- C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp 22.025.639.180,00.
- D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp 441.297.200,00.
- E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Rp 514.057.380,00.

Data Pagu Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI</b>							
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>160.414.677.764</b>			<b>104.350.347.550</b>
2.16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>159.531.404.144</b>			<b>102.949.827.550</b>
2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>		<b>82.75</b>	<b>18.826.330.614</b>		<b>82.80</b>	<b>22.674.827.550</b>
2.16.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia</b>		<b>16 dokumen</b>	<b>29.676.300</b>		<b>16 dokumen</b>	<b>34.609.300</b>
2.16.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	3 dokumen	18.018.000		3 dokumen	21.215.700
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 laporan	5.139.800		1 dokumen	6.274.400
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 laporan	6.518.500		12 dokumen	7.119.200
2.16.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia		75 dokumen	<b>15.116.593.114</b>		75 dokumen	<b>16.643.680.900</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	75 Orang/Bulan	14.413.880.114		69 Orang/Bulan	15.081.523.600
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	11 dokumen	702.713.000		11 dokumen	1.562.157.300
<b>2.16.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia		12 bulan	<b>298.508.140</b>		12 bulan	<b>697.171.200</b>
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	4.488.840		1 paket	5.769.500
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	8 paket	40.007.200		8 paket	294.151.000
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	45 paket	87.500.000		45 paket	96.250.000
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	13.660.900		1 paket	24.471.700
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	13505 dokumen	31.522.200		13505 dokumen	43.890.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 laporan	0		12 laporan	12.639.000
2.16.01.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	50 laporan	121.329.000		50 laporan	220.000.000
2.16.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		3 paket	0		3 paket	<b>98.565.500</b>
2.16.01.1.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 paket	0		2 paket	32.496.200
2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	10 unit	0		10 unit	66.069.300
2.16.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		12 bulan	<b>533.000.000</b>		12 bulan	<b>626.125.500</b>
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 laporan	3.000.000		1 laporan	3.690.500
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar	12 laporan	350.000.000		12 laporan	402.435.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Timur, Sumerta Kelod					
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6 Laporan	180.000.000		6 Laporan	220.000.000
<b>2.16.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai		674 unit	<b>2.848.553.060</b>		674 unit	<b>4.574.675.150</b>
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	28 unit	1.386.501.960		28 unit	2.353.052.900
2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	489 unit	6.400.000		489 unit	8.215.900
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	99 unit	99.570.000		99 unit	199.518.000
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7 unit	1.271.601.100		7 unit	1.863.738.350
2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	51 unit	84.480.000		51 unit	150.150.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Informasi Yang Disebarluaskan</b>		93,40 persen	<b>12.359.127.160</b>		94,10 persen	<b>24.893.000.000</b>
2.16.02.1.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi		82 indeks	<b>12.359.127.160</b>		83 indeks	<b>24.893.000.000</b>
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	9 kab/kota	120 dokumen	953.492.960		120 dokumen	1.918.180.000
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	9 kab/kota	30000 Dokumen	5.334.563.440		30000 Dokumen	11.257.730.000
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	9 kab/kota	96 Dokumen	1.385.259.640		96 Dokumen	4.748.425.000
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	9 kab/kota	200 Orang	2.537.087.840		200 Orang	3.505.216.000
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	9 kab/kota	4 Dokumen	1.813.347.980		4 Dokumen	1.938.530.000
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	9 kab/kota	20000 Dokumen	335.375.300		20000 Dokumen	1.524.919.000
2.16.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan Teknologi Informatika</b>		91,00 persen	<b>128.345.946.370</b>		93,10 persen	<b>55.382.000.000</b>
2.16.03.1.02	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan Intranet, Internet dan Aplikasi</b>		100 persen	<b>128.345.946.370</b>		100 persen	<b>55.382.000.000</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		2 Dokumen	1.306.175.700			
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 Unit	114.786.841.630		1 Unit	21.478.498.700
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	9 kab/kota	1 Dokumen	12.252.929.040		1 Dokumen	19.367.539.300
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>416.841.840</b>			
2.20.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>		4,0 Indeks	<b>416.841.840</b>		4,2 indeks	<b>652.520.000</b>
2.20.02.1.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi		11 Sektor	<b>416.841.840</b>		11 sektor	<b>652.520.000</b>
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 kab/kota	1 Dokumen	150.743.840		1 Dokumen	228.503.000
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	9 kab/kota	1 Dokumen	164.656.480		1 dokumen	232.700.600
2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	9 kab/kota	1 Dokumen	101.441.520		1 Dokumen	191.316,400
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>466.431.780</b>			<b>748.000.000</b>



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Indeks Evalaksan</b>		75 indeks	<b>466.431.780</b>		76 indeks	<b>748.000.000</b>
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan		29 OPD	337.335.940		29 OPD	575.600.000
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 Dokumen	36.899.300		2 Dokumen	81.500.000
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 Laporan	168.137.340		1 Laporan	215.000.000
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 Laporan	33.541.300		1 Laporan	159.100.000
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	9 kab/kota	29 OPD	98.758.000		29 OPD	120.000.000
<b>2.21.02.1.02</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	9 kab/kota	29 OPD	<b>129.095.840</b>		29 OPD	<b>172.400.000</b>
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	9 kab/kota	29 OPD	129.095.840		29 OPD	172.400.000
<b>UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL</b>								
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>6.136.378.140</b>			<b>0</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.136.378.140			0
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				6.136.378.140			
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				6.136.378.140			
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				6.136.378.140			
	UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.817.674.924			0
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2.817.674.924			0
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.817.674.924			0
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				2.817.674.924			0
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				2.817.674.924			0

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja ini mengacu kepada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Selanjutnya semoga Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.